

**PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PENGELOLAAN EKOWISATA  
DI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) KONSERVASI PENYU KOTA  
PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

***THE ROLE OF STAKEHOLDERS IN THE MANAGEMENT OF ECOTURISM  
AT THE TECHNICAL IMPLEMENTATION UNIT (TIU) FOR TURTLE  
CONSERVATION IN PARIAMAN CITY WEST SUMATERA PROVINCE***

**Halimah Dwi yolanda\*, Kastana Sapanli, Nuva**

Program Studi Magister Ekonomi Kelautan Tropika, Departemen Ekonomi Sumberdaya  
Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor,  
Jl. Agatis Kampus IPB Dramaga, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, 16680, Indonesia

\*e-mail: halimahdwiyolandahalimah@apps.ipb.ac.id

**ABSTRAK**

Penyu termasuk satwa yang dilindungi dan memerlukan pendekatan konservasi untuk mencegah penurunan populasinya. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah konservasi berbasis ekoturisme. Di Indonesia, pendekatan ini diimplementasikan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Penyu di Kota Pariaman. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran *stakeholder* dalam mendukung keberlanjutan program konservasi di UPT tersebut. Metode *Matrix of Alliance Conflicts Tactics and Recommendations* (MACTOR) digunakan dalam proses analisis. Hasil kajian menunjukkan adanya konvergensi dan divergensi di antara aktor-aktor yang terlibat, serta ambivalensi yang mempengaruhi efektivitas program konservasi. Studi ini memberikan arahan kebijakan guna memperkuat sinergi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

**Kata kunci:** *ekowisata; konservasi penyu; MACTOR; pemangku kepentingan; pengelolaan.*

**ABSTRACT**

*Turtles are protected animals, which necessitates conservation efforts to prevent their population decline, one of which is ecotourism-based conservation. In Indonesia, the Technical Implementation Unit (TIU) for Turtle Conservation in Pariaman City exemplifies this. This research aims to analyze the role of stakeholders in the sustainability of the TIU. The analysis uses the Matrix of Alliance Conflicts Tactics and Recommendations (MACTOR) method. The analysis results indicate the presence of convergence and divergence among the involved actors, as well as ambivalence that affects the effectiveness of the conservation program. The researchers aim to provide recommendations to enhance collaboration and management effectiveness, support turtle conservation, and improve the welfare of local communities.*

**Keywords:** *ecotourism; turtle conservation; MACTOR; management; stakeholder.*

**PENDAHULUAN**

Penyu tergolong hewan laut yang terancam punah dan dilindungi berdasarkan peraturan internasional dan termasuk kedalam Apendix I CITES serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Semua jenis penyu dan telurnya dilindungi dari perdagangan dan eksploitasi, makanya diperlukannya konservasi penyu (Wilson et al., 2014.). Konservasi penyu merupakan

bagian dari upaya pelestarian keanekaragaman hayati yang diiringi dengan pengelolaan kawasan, sering kali dikembangkan sebagai destinasi ekowisata yang menjaga keseimbangan ekosistem sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar (Komarudin & Fahrunnisa, 2023).

Ekowisata konservasi penyu di Indonesia adalah bentuk pariwisata berkelanjutan yang bertujuan untuk melindungi spesies penyu yang terancam punah sambil mendidik wisatawan tentang pentingnya konservasi penyu, serta berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui partisipasi dalam pengelolaan ekowisata dan menciptakan lapangan kerja. Di Indonesia terdapat banyak ekowisata berbasis konservasi penyu diantaranya, Taman Nasional Kepulauan Seribu, Taman Nasional Meru Betiri, Pantau Sukamade, Pulau Derawan, *Turtle Conservation and Education Center*, serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Penyu Pariaman yang menjadi pusat konservasi penting di wilayah tersebut (Usman, 2016).

UPT Konservasi Penyu Kota Pariaman ditetapkan sebagai kawasan konservasi berdasarkan Keputusan Walikota Pariaman pada tanggal 20 Oktober 2010 berdasarkan SK No. 334/523/2010 dengan *property right* atau kepemilikan kawasan di bawah naungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Awalnya UPT dikelola oleh Pemerintah Kota Pariaman tetapi kemudian terjadi pengalihan pengelolaan pada tahun 2018 oleh Pemerintah Sumatera Barat. Pergeseran kewenangan ini menimbulkan sejumlah tantangan termasuk penurunan jumlah kunjungan, konflik dengan masyarakat lokal serta masalah koordinasi antar lembaga pengelola dan komunitas sekitar (DKP Prov Sumbar, 2024).

Dampak dari peralihan pengelolaan ini tidak hanya terlihat dari segi wisatawan, tetapi juga mencakup peningkatan ancaman terhadap habitat penyu, tingginya angka kematian penyu, dan keterbatasan tenaga medis di lokasi konservasi. Selain itu, rendahnya pelibatan masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah desa memperlemah dukungan sosial dalam program konservasi. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk mengidentifikasi peran para pemangku kepentingan dalam pengelolaan UPT Konservasi Penyu Kota Pariaman agar tercipta strategi pengelolaan yang inklusif dan berkelanjutan.

## **METODE**

### **Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei 2024 di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Penyu Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat. Lokasi ini dipilih

karena UPT Konservasi Penyu Kota Pariaman merupakan pusat konservasi penyu yang terlengkap di Sumatera Barat, dengan fasilitas dan infrastruktur yang relatif lebih baik dibanding kawasan konservasi lainnya, alasan lainnya karena letak geografis Kota Pariaman yang sangat strategis dan berbatasan langsung dengan Samudera Hindia yang menjadi kawasan strategis baik secara ekonomi maupun geopolitik, menjadi jalur perdagangan yang menghubungkan Afrika, Asia, dan Eropa, kaya akan keanekaragaman hayati yakni terumbu karang, berbagai spesies ikan, paus, lumba-lumba dan penyu, serta aksesibilitas di daratan Kota Pariaman yang memiliki jalan raya yang cukup baik yang menghubungkan kawasan perkotaan dengan desa-desa sekitar, jalan-jalan utama seperti jalan raya Pariaman- Padang dan jalan-jalan menuju tempat wisata sudah di aspal, mudah diakses dari pusat kota dan tersedianya transportasi publik seperti angkot, ojek, dan bus mini yang melayani rute-rute utama serta sewa kendaraan buat wisatawan.

### **Jenis dan Metode Pengambilan Data/ Alat dan Bahan**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dan wawancara untuk memperoleh pemahaman menyeluruh terkait peran aktor dalam pengelolaan ekowisata di UPT Konservasi Penyu. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui survei lapangan, wawancara langsung dengan para pemangku kepentingan, serta kuesioner yang diolah dengan menggunakan perangkat lunak MACTOR (*Matrix of Alliance, Conflicts, Tactics, Objectives and Recommendations*). Responden yang terlibat dalam penelitian ini berjumlah 14 orang, terdiri dari perwakilan dari masing-masing institusi: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pariaman, Dinas Pariwisata Provinsi dan Kota Pariaman, pengelola UPT, aparaturnya desa, dan tokoh masyarakat atau tokoh adat.

### **Metode Analisis/ Desain**

Metode analisis yang digunakan ialah metode analisis MACTOR (*Matrix of Alliance, Conflicts, Tactics, Objectives and Recommendations*) mengidentifikasi peran dan posisi masing-masing aktor terhadap pengelolaan kawasan konservasi (Fauzi, 2018). MACTOR dipilih karena kemampuannya dalam memetakan relasi kekuasaan, ketergantungan, dan dinamika tujuan antara berbagai pemangku kepentingan. Keunggulan metode ini terletak pada kemampuannya menjelaskan posisi strategis setiap aktor dalam sistem yang kompleks, sekaligus memfasilitasi pengambilan keputusan berbasis kolaboratif. Namun, metode ini juga memiliki keterbatasan,

khususnya terkait keandalan data input karena bergantung pada keterbukaan responden (Edi, 2019). Hasil analisis data diperoleh melalui tiga tahap: mengidentifikasi tujuan yang paling reaktif dalam pengelolaan UPT, menilai pengaruh dan ketergantungan aktor dengan memeriksa sinergi dan kepentingan yang terjadi di antara mereka, serta menganalisis hubungan antaraktor yang memberikan peluang untuk kolaborasi (konvergensi) atau konflik (divergensi), yang dapat mempengaruhi keberlanjutan ekoturisme. Analisis ini juga menghasilkan hasil yang ambivalen, mencerminkan hasil dari konvergensi dan divergensi. Model analitis yang digunakan didasarkan pada :

1. Identifikasi tujuan – tujuan utama pengelolaan berkelanjutan

Yaitu melakukan identifikasi tujuan – tujuan utama yang berkaitan dengan isu keberlanjutan yang dapat dilakukan melalui FGD ataupun wawancara terstruktur menggunakan kuisisioner. FGD dilakukan untuk mengidentifikasi aktor yang terlibat dan tujuan yang ingin dicapai. Dalam penelitian ini, identifikasi konteks keberlanjutan dikelompokkan ke dalam tiga aspek keberlanjutan yakni aspek lingkungan, aspek ekonomi, dan aspek sosial.

2. Pengaruh dan ketergantungan aktor

Yakni melalui Pengisian angka atau skor pada matriks MDI dilakukan dengan kaidah Godet (1991). Pengaruh antar aktor terhadap aktor lainnya yang ditunjukkan dengan skor 0 sampai 4 dengan ketentuan: 0 (tidak ada pengaruh), 1 (memengaruhi prosedur operasional), 2 (memengaruhi pekerjaan), 3 (memengaruhi misi aktor), dan 4 (memengaruhi eksistensi aktor). Setelah tabel MDI diisi, langkah selanjutnya adalah melengkapi tabel 1MAO. Matriks 1MAO mencerminkan sikap aktor terhadap tujuan dengan nilai 1 (mendukung), -1 (menentang), dan 0 (netral). Kombinasi dari kedua matriks ini akan menghasilkan matriks 2MAO. Dalam matriks MDI, aktor akan dikategorikan ke dalam empat kelompok utama: pemangku kepentingan yang berpengaruh, pemangku kepentingan penghubung, pemangku kepentingan yang bergantung, dan pemangku kepentingan otonom. Perangkat lunak MACTOR akan menghitung pengaruh langsung dan tidak langsung antara aktor berdasarkan MDI, menghasilkan MIDI di antara aktor melalui rumus berikut:

$$MIDI_{A-B} = MII_{A-B} + \epsilon_C (\min(MID_{A-C} \cdot MID_{C-B})) \dots \dots \dots (1)$$

Sebelum menghitung keseimbangan kekuatan (*balance of power*) dari para aktor, maka perlu dihitung terlebih dahulu pengaruh total langsung satu aktor ke yang lainnya (MA), serta dapat diartikan juga sebagai ketergantungan aktor

terhadap aktor lainnya dengan menggunakan persamaan 1. Koefisien *balance of power* dihitung dengan persamaan 2.

$$M_A = \epsilon_B (MID_{A,B}) - MID_{A,A} \dots\dots\dots(2)$$

$$D_A = \epsilon (MID_{B,A}) - MID_{A,A} \dots\dots\dots(3)$$

$$r_A = \left( \frac{M_A - MID_{A,A}}{\epsilon_A (M_A)} \right) X \left( \frac{M_A}{M_A + D_A} \right) \dots\dots\dots(4)$$

Selanjutnya MACTOR menghitung matriks 3MAO, yang merupakan produk dari matriks 2MAO dan koefisien rA, seperti yang ditunjukkan dalam Persamaan 5.

$$3MAO_{A,i} = 2MAO_{A,i} X r_A \dots\dots\dots(5)$$

Matriks 3MAO ini sangat penting dan menjadi dasar dalam analisis MACTOR yaitu analisis antar aktor yang terlibat dan berperan dalam kebijakan pengelolaan sampah. Analisis tersebut terdiri atas: 1) analisis konvergensi, yang ditunjukkan oleh matriks 3CAA (persamaan 6); 2) analisis divergensi, yang ditunjukkan oleh matriks 3DAA (persamaan 7); dan 3) koefisien ambivalensi dari setiap aktor yang dihitung melalui persamaan 8.

$$3CAA = \frac{1}{2} \epsilon_i (3MAO_{A,i} + 3MAO_{B,i}) (3MAO_{A,i} X 3MAO_{B,i} > 0) \dots\dots\dots(6)$$

$$3DAA = \frac{1}{2} \epsilon_i (3MAO_{A,i} + 3MAO_{B,i}) (3MAO_{A,i} X 3MAO_{B,i} < 0) \dots\dots\dots(7)$$

$$3EQ_i = 1 - \left( \frac{\epsilon_k (3CAA_{i,k} - 3DAA_{i,k})}{\epsilon_A (3CAA_{i,k} + 3DAA_{i,k})} \right) \dots\dots\dots(8)$$

Aktor atau pemangku kepentingan memainkan peran penting dalam menentukan apakah suatu aktivitas, program, atau sistem akan berlanjut atau tidak. Posisi aktor dalam kuadran pengaruh dan ketergantungan akan membantu memahami interaksi antaraktor terjadi dalam mencapai tujuan dan memobilisasi aktor untuk mencapai tujuan tersebut.

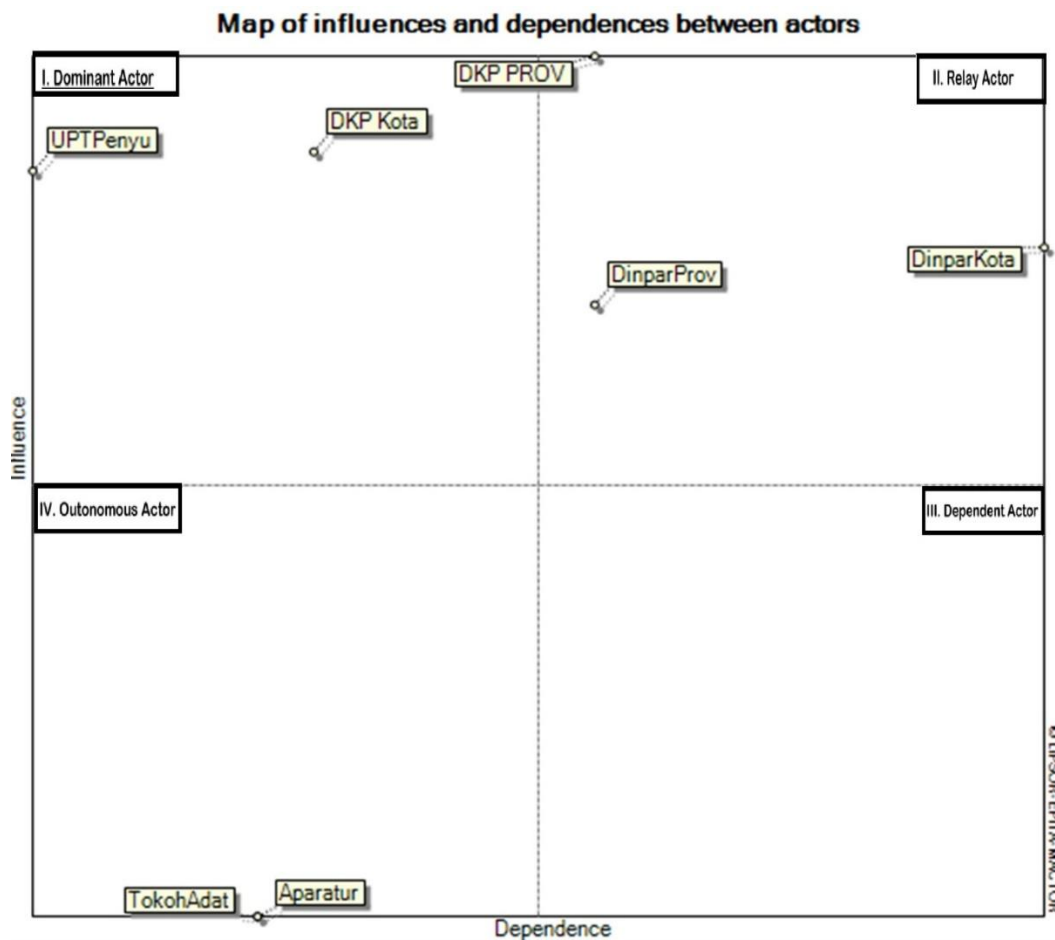
### 3. Sinergi dan Kepentingan Aktor

Pendekatan MACTOR digunakan untuk memahami sinergi dan kepentingan yang terjadi di antara aktor yang terlibat dalam pengelolaan ekoturisme di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Penyu. Hubungan antaraktor memberikan peluang untuk kerjasama (konvergensi) dan konflik (divergensi), yang dapat mempengaruhi keberlanjutan kegiatan pariwisata. Konvergensi mengacu pada kecenderungan aktor untuk bersinergi atau berkolaborasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengaruh dan Ketergantungan Aktor

Analisis pengaruh dan ketergantungan dilakukan untuk memetakan posisi setiap *stakeholder* yang memiliki kepentingan dan ketergantungan terhadap kawasan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Penyu, yang dibantu dengan *Matrix of Direct and Indirect Influences* (MDII). Hasil analisis disajikan dalam bentuk pemetaan tingkat pengaruh dan ketergantungan yang dibagi menjadi empat kuadran pada Gambar 1



**Gambar 1. Pengaruh dan Ketergantungan Aktor**

Sumber: data primer setelah diolah 2024

Pada gambar 1 dapat dilihat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi berada pada dua kuadran yakni Kuadran I (*dominant Actor*) dan Kudran II (*relay actor*) yakni aktor yang paling berpengaruh dan tingkat ketergantungan pada aktor lainnya rendah, serta tidak stabil sehingga sangat sensitif terhadap keberadaan aktor lain, dikarenakan sensitif terhadap keberadaan aktor lain, dimana Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Penyu berada dibawah naungan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumatera Barat,

Terdapat dua aktor lainnya selain Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat yang berada pada Kuadran I (*dominant actors*) yaitu UPT Konservasi Penyu, dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Pariaman yakni aktor yang paling berpengaruh dan tingkat ketergantungan pada aktor lain rendah dikarenakan aktor ini yang dapat mempengaruhi tujuan dari aktor lain yang dapat mendukung segala kegiatan di kawasan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Penyu

Terdapat dua aktor lainnya selain Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sumatera Barat yang berada di Kuadran II (*relay actor*), yaitu Dinas Pariwisata Provinsi dan Kota Pariaman yakni aktor yang tidak stabil, karena tingkat pengaruh dan ketergantungan yang tinggi terhadap kawasan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Penyu, sehingga aktor ini lebih sensitif terhadap aktor lain. Kedua aktor ini dapat mendukung kegiatan di kawasan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Penyu bila terjadi sinergi yang baik antar aktor. Adapun demikian, pengaruh dan ketergantungan setiap aktor yang cenderung tinggi juga dapat mengancam keberlanjutan kegiatan wisata dengan adanya konflik kepentingan antar aktor. Kecenderungan aktor untuk bekerja sama ataupun berpotensi konflik dapat dilihat dari hubungan konvergensi dan divergensinya.

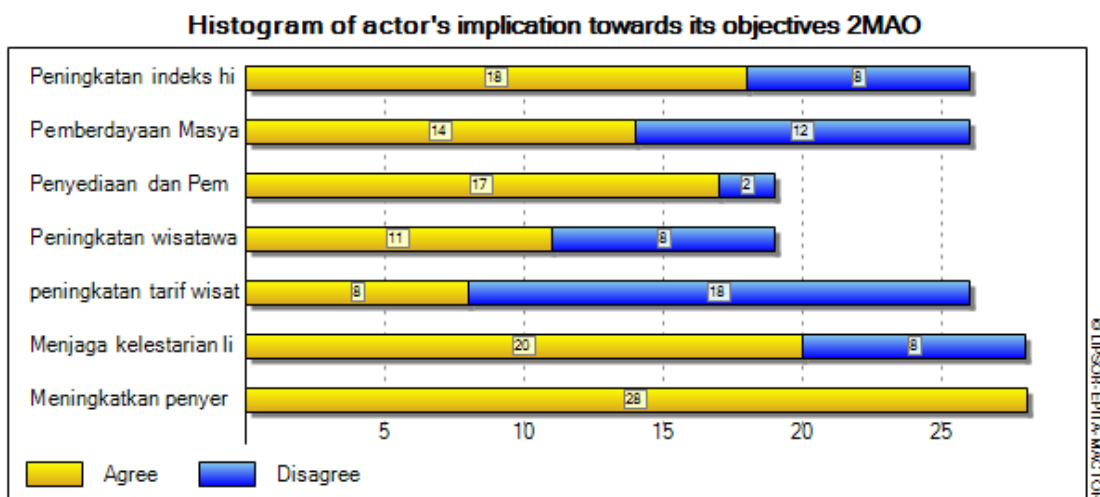
Berbeda dengan relay actor, pada kuadran IV atau *outonomous actor* yang disebut juga sebagai aktor sekunder memiliki pengaruh serta ketergantungan yang rendah. Kuadran ini terdapat dua aktor, dengan tingkat pengaruh terendah dimiliki oleh Aparatur Desa Apar dan Tokoh Adat /Tokoh Masyarakat Hal ini karena Aparatur Desa Apar dan Tokoh Adat /Tokoh Masyarakat ini tidak dilibatkan secara langsung dalam pengelolaan kawasan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Penyu. Peran dari Aparatur Desa Apar dan Tokoh Adat /Tokoh Masyarakat hanya sebagai melayani segala sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat misalnya membantu masyarakat dan membantu pemerintah desa untuk mencatat data kependudukan, serta pengambilan keputusan diambil dengan cara musyawarah mufakat dan voting di Desa. Minimnya pelibatan mereka dalam proses perencanaan dan pengelolaan menyebabkan posisi mereka berada di luar jangkauan pengaruh strategis. Padahal, keterlibatan langsung komunitas lokal sangat diperlukan dalam keberhasilan ekowisata berbasis konservasi.

Posisi dan pengaruh Desa Apar dan Tokoh Adat /Tokoh Masyarakat terhadap kawasan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Penyu masih sangat rendah, seharusnya dapat berada di kuadran II karena peran Desa Apar dan Tokoh Adat /Tokoh Masyarakat ini termasuk penting dalam memberikan wawasan kepada masyarakat sekitar mengenai pelestarian penyu dan telur penyu. Rendahnya pengaruh Desa Apar

dan Tokoh Adat /Tokoh Masyarakat dapat disebabkan oleh Kurangnya keterlibatan desa dan tokoh adat dalam pengambilan kebijakan mencerminkan lemahnya aspek partisipatif dalam tata kelola konservasi. Berdasarkan wawancara, mereka hanya dilibatkan dalam kegiatan seremoni ketika terdapat kunjungan resmi dari pemerintah pusat, dan tidak memiliki peran strategis dalam perencanaan program.

### Objektif Pengelolaan.

Tujuan atau objektif yang dicapai merupakan objektif yang reaktif terhadap isu pengelolaan ekowisata berkelanjutan di kawasan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Penyu. Terdapat enam objektif, yaitu 1) peningkatan Indeks Hidup Penyu; 2) pemberdayaan masyarakat; 3) penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana; 4) peningkatan wisatawan melalui sosial media; 5) peningkatan tarif wisata; 6) menjaga kelestarian lingkungan; 7) meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang memiliki keterampilan sesuai dengan kebutuhan,



**Gambar 2. Objektif yang Mendorong Aktor untuk Reaktif**

Sumber: data primer setelah diolah 2024

Dari gambar 2 dapat dilihat dari beberapa objektif terdapat aktor yang setuju dan tidak setuju tentang objektif dari pengelolaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Penyu, berikut diurutkan objektif berdasarkan dari aktor yang banyak setuju, sebagai berikut ini :

1. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang memiliki keterampilan sesuai dengan kebutuhan

Berdasarkan hasil analisis, tujuan yang paling disetujui oleh aktor adalah penyerapan tenaga kerja yang kompeten. Hal ini selaras dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang menekankan pentingnya peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan berbasis kebutuhan lapangan. Kebutuhan terhadap tenaga medis, seperti dokter hewan, di kawasan konservasi juga menjadi alasan utama perlunya tenaga kerja yang terlatih dan siap pakai. Selain itu di UPT konservasi penyu sangat memerlukan tenaga kerja yang memiliki keterampilan sesuai dengan kebutuhan dikarenakan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) konservasi penyu tidak adanya tenaga medis atau dokter hewan untuk memeriksa keadaan penyu secara rutin dan mencegah kendala atau penyakit yang akan terjadi pada penyu tersebut. Karena tidak adanya tenaga medis yang dimiliki pihak Unit Pelaksana Teknis (UPT) konservasi penyu terpaksa memberikan surat ke Dinas Lingkungan Hidup untuk mendatangkan dokter hewan atau tenaga medis ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) konservasi penyu dan ini membutuhkan banyak waktu dan membuat penyu tersebut tidak dalam jangka waktu dekat untuk diobati bahkan tidak bisa obati karena penyu yang sakit tersebut keburu mati, ini disebabkan tenaga medis tersebut tidak berada di dalam ruang lingkup kerja atau tidak berada di satu instansi serta harus membuat jadwal khusus untuk menyesuaikan dengan waktu tenaga medis tersebut.

## 2. Menjaga Kelestarian Lingkungan

Objektif kedua yang reaktif terhadap aktor dalam pengelolaan kawasan UPT konservasi penyu Kota Pariaman adalah pelestarian kawasan. Unit Pelaksana Teknis merupakan ekowisata yang termasuk kedalam kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil seperti yang tertera pada Kepmen KP No. 106 Tahun 2021 Tanggal 18 November 2021 tentang Taman di Perairan dengan target konservasi terumbu karang dan penyu. Apabila terjadi keadaan tertentu seperti terganggunya kelestarian kawasan maka Pemerintah dapat menghentikan kegiatan ekowisata untuk mempertahankan atau memulihkan kelestarian sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya. Oleh sebab itu perlunya keterlibatan segala *stakeholder* agar selalu menjaga kelestarian lingkungan disekitar kawasan ekowisata Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Penyu Kota Pariaman.

Apabila terjadi penghentian kegiatan ekowisata di UPT Konservasi Penyu berpotensi menghilangkan mata pencaharian masyarakat setempat biaya yang dikeluarkan lebih untuk mencari nafkah di tempat baru. Untuk itu, kolaborasi

lintas sektor sangat diperlukan, termasuk dari masyarakat sekitar, instansi pengelola, dan pengunjung.

### 3. Peningkatan Indeks Hidup Penyu

Objek peningkatan indeks hidup penyu disetujui oleh lima aktor dan perlu dilakukan dalam pengelolaan ekowisata pada UPT Konservasi Penyu untuk mengembangkan kawasan tersebut. Setiap aktor menganggap bahwa peningkatan indeks hidup penyu merupakan hal terpenting untuk memajukan kawasan konservasi penyu yakni Unit Pelaksana Teknis (UPT). Menurut (Fauzi, 2018), peningkatan indeks hidup penyu merupakan komponen penting dalam mengembangkan kawasan konservasi, dengan meningkatnya indeks hidup penyu maka mewujudkan kelestarian sumberdaya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya, sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan dan mutu kehidupan manusia, dan melestarikan kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara serasi dan seimbang.

Kerjasama dari berbagai *stakeholder* diperlukan terutama Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumatera Barat yang memiliki pengaruh tertinggi serta paling reaktif, karena memiliki peran sebagai pengelola kawasan konservasi khususnya di UPT Konservasi Penyu Kota Pariaman sebagai sektor ekowisata. Program yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumatera Barat untuk peningkatan indeks hidup penyu ialah memberikan sanksi kepada masyarakat yang memperjual-belikan telur penyu dan penyu, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang manfaat penyu di alam serta pentingnya penyu untuk menjaga ekosistem di alam, dan memberikan kompensasi kepada masyarakat yang melihat penyu naik ke darat untuk bertelur, dan mengambil telur penyu tersebut untuk diserahkan ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Penyu. dengan berbagai cara yang dilakukan tersebut diharapkan memberikan dampak positif bagi peningkatan indeks hidup penyu di UPT Konservasi Penyu Kota Pariaman.

### 4. Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Objektif penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Penyu lima aktor menyetujui. Ini dikarenakan untuk penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang merupakan tanggung jawab oleh dinas terkait yakni Dinas Perikanan dan

Kelautan Provinsi Sumatera Barat, semua aktor bertanggung jawab karena UPT Konservasi Penyu ini berada di bawah dinas tersebut, serta aktor lain tidak terlibat dalam hal tersebut. Seharusnya adanya kesadaran dari semua aktor untuk penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada di Unit Pelaksana Teknis (UPT) konservasi penyu karena memiliki dampak langsung dan tidak langsung terhadap semua aktor. Karena adanya Unit Pelaksana Teknis (UPT) ini aktor tersebut memiliki peran dan tanggung jawab dengan keberadaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Penyu ini.

5. Peningkatan wisatawan melalui sosial media

Objektif peningkatan kegiatan promosi ini disetujui oleh 4 aktor dari 7 aktor. Objektif peningkatan kegiatan promosi dapat mengatasi penurunan tingkat kunjungan saat *low season* selain itu dapat mengenalkan ekowisata Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Penyu ke masyarakat yang lebih luas, sehingga tingginya tingkat kunjungan wisatawan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar yang memiliki usaha ekowisata serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Barat, serta memerlukan dukungan dari semua aktor supaya Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Penyu dikenal oleh seluruh kalangan masyarakat.

6. Peningkatan tarif wisata

Objektif peningkatan tarif wisata disetujui hanya oleh dua aktor dan ditolak oleh kelima aktor ini dikarenakan beberapa aktor yang termasuk kedalam organisasi pemerintahan menyatakan bahwa kenaikan harga tiket dapat memengaruhi peningkatan PAD Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan PERDA Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang tarif wisata. Pendapatan dari tarif retribusi tiket masuk dan tiket bus air dikelola oleh Dinas Pariwisata yang kemudian akan diberikan kepada Badan Pendapatan Daerah. Berdasarkan hasil wawancara terhadap Dinas Pariwisata, kenaikan retribusi tiket masuk juga digunakan untuk memperbaiki fasilitas wisata di kawasan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Penyu.

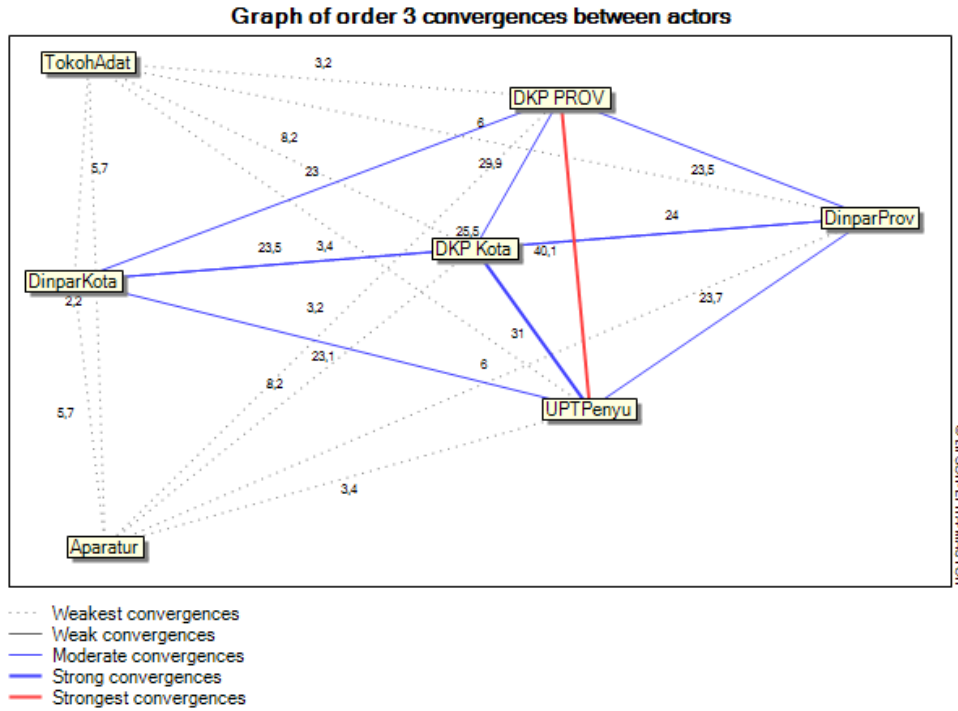
Perbaikan fasilitas dapat meningkatkan kualitas ekowisata penyu sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan. Adapun demikian aktor organisasi non pemerintahan yang memiliki persetujuan pada peningkatan tarif wisata, yaitu Aparatur Desa Apar dan Tokoh Masyarakat atau Tokoh Adat menyetujui peningkatan tarif wisata karena tarif wisata tersebut akan digunakan sebagai

salah satu sumber dana event yang akan diadakan. Walaupun ada persetujuan dari semua stakeholder akan memberikan dampak negatif karena dengan adanya peningkatan tarif wisata dapat menurunkan minat wisatawan untuk berkunjung ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Penyu dan dapat menurunkan tingkat pendapatan para aktor tersebut.

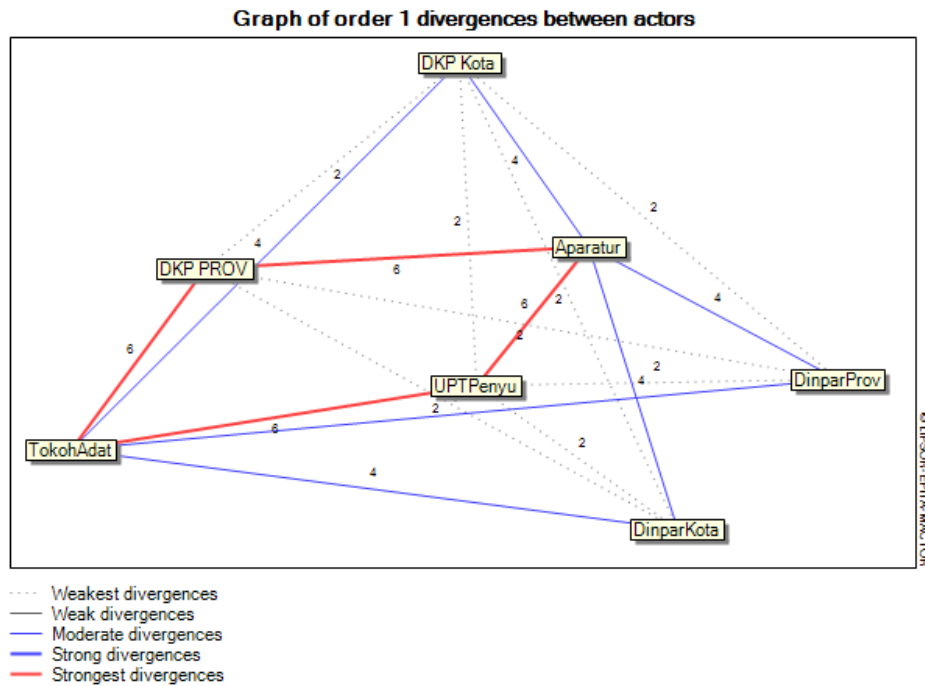
#### 7. Pemberdayaan Masyarakat

Objek pemberdayaan masyarakat disetujui oleh semua aktor dan perlu dilakukan dalam pengelolaan ekowisata di Unit Pelaksana Teknis (UPT) konservasi penyu untuk mengembangkan kawasan tersebut. Setiap aktor menganggap bahwa pemberdayaan masyarakat disekitar Unit Pelaksana Teknis (UPT) konservasi penyu merupakan hal terpenting untuk memajukan ekowisata konservasi penyu sama dengan penelitian Ismane et al., (2018). Menurut Suwanta et al., (2016), masyarakat merupakan komponen penting dalam pariwisata, adanya masyarakat akan menyambut wisatawan dan memberikan pelayanan ke wisatawan yang berkunjung UPT konservasi penyu. Masyarakat perlu untuk mengetahui kualitas layanan yang diberikan kepada wisatawan sehingga pemerintah melalui instansi terkait perlu melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat. Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan aktor yang memiliki pengaruh tinggi serta paling reaktif, karena memiliki peran sebagai pengelola Unit Pelaksana Teknis (UPT) konservasi penyu sebagai sektor ekowisata. Program yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumatera Barat untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat seperti memberikan kesempatan kepada masyarakat sekitar kawasan Unit Pelaksana Teknis (UPT) konservasi penyu untuk membuka usaha ekowisata di Unit Pelaksana Teknis (UPT) konservasi penyu dan juga memberikan pembinaan kepada masyarakat pelaku usaha. Pembinaan masyarakat akan memberikan dampak positif bagi masyarakat pelaku usaha dan wisatawan.

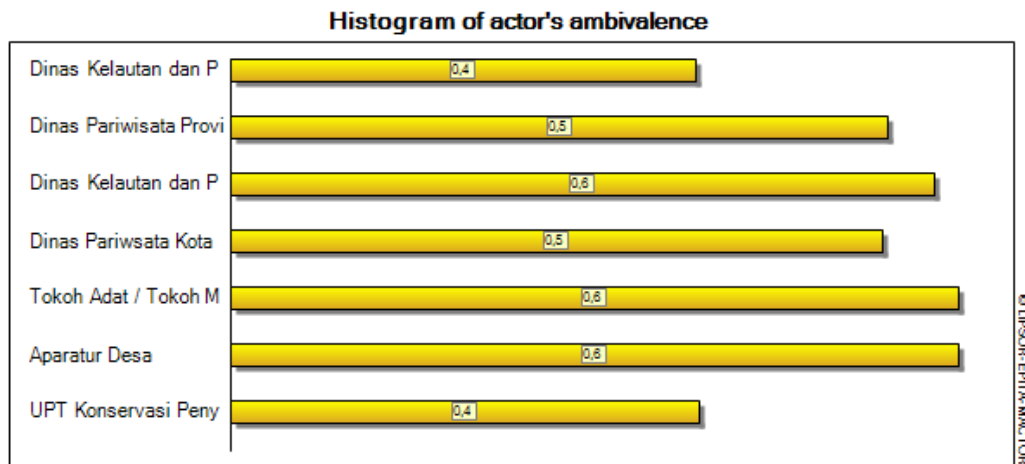
**Sinergi dan Interest Aktor**



(a)



(b)



(c)

**Gambar 3. (a) konvergensi (b) divergensi (c) ambivalen**

Sumber: data primer setelah diolah 2024

Sinergi dan Interest Aktor sebagaimana yang ditampilkan pada Gambar 3. dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Konvergensi

Hubungan konvergensi menggambarkan kecenderungan aktor-aktor yang terlibat untuk saling bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Dalam konteks pengelolaan UPT Konservasi Penyu Kota Pariaman, tingkat konvergensi tertinggi terlihat antara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dengan UPT Konservasi Penyu. Hal ini wajar mengingat secara struktural UPT berada di bawah koordinasi langsung dinas tersebut, sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dimana pada BAB V telah diatur bahwa kewenangan Daerah Provinsi di laut dan daerah provinsi yang berciri kepulauan adalah: mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya, yang meliputi: eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi, pengaturan administratif, pengaturan tata ruang, ikut serta dalam memelihara keamanan di laut serta ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara, maka dari itu UPT konservasi penyu dibawah kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat untuk mengelola kawasan konservasi untuk menjalankan fungsinya dalam pelaksanaan penyusunan rencana teknis operasional konservasi dan pengawasan; pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi operasional konservasi dan pengawasan; pelaksanaan pengawasan terhadap seluruh kegiatan konservasi dan pengawasan

sumberdaya kelautan dan perikanan pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas konservasi dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Kawasan Konservasi.

Aktor yang memiliki konvegensi yang kuat yakni UPT Konservasi Penyu terhadap Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Pariaman, namun hubungannya masih bersifat lemah karena minimnya koordinasi formal dengan pihak pengelola kawasan konservasi mengingat awal mula terbentuknya UPT Konservasi Penyu ini dikelola dan dibawah kewenangan Dinas Perikanan dan Kota Pariman, dan berlokasi di wilayah kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pariaman, serta ketidakterlibatan mereka dalam perencanaan atau pengambilan keputusan membuat dukungan sektor pariwisata belum optimal, terutama dalam promosi dan pengembangan fasilitas pendukung wisata.

Beberapa aktor yang termasuk kedalam *relay actor* atau memiliki pengaruh tinggi terhadap kawasan ekowisata UPT Konservasi Penyu namun memiliki hubungan konvergensi yang lemah terhadap beberapa aktor lain, seperti Dinas Pariwisata Provinsi Sumbar dan Kota Pariaman. Hubungan konvergensi Dinas Pariwisata Provinsi Sumbar dan Kota Pariaman dengan beberapa aktor yakni Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumbar dan Kota Pariaman serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) cenderung lemah, hal ini karena Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat dan Kota Pariaman belum memiliki kerjasama dengan *stakeholder* yang kuat dan agar dapat terlibat langsung dalam pengelolaan kawasan ekowisata di UPT Konservasi Penyu.

Sebagian kawasan ekowisata UPT Konservasi Penyu terletak di Kota Pariaman yang memungkinkan adanya hubungan konvergensi yang kuat antara Dinas Pariwisata Kota Pariaman dan Unit Pelaksana Teknis (UPT), serta kurangnya koordinasi dengan Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Pariman. sedangkan Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat dengan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumatera Barat tidak adanya kerjasama antar instansi pemerintahan yang ada di Provinsi Sumatera Barat tersebut. Dengan kata lain ini semua disebabkan oleh kurangnya koordinasi dari beberapa instansi yang belum berjalan dengan baik dalam pemanfaatan dan pengelolaan kawasan ekowisata di UPT Konservasi Penyu sehingga adanya kegiatan wisata belum memberikan manfaat bagi Dinas Pariwisata Provinsi Sumbar dan Kota Pariaman.

Aktor lain yang memiliki konvergensi yang sangat lemah terhadap beberapa aktor khususnya UPT, yaitu Aperatur Desa Apar dan Tokoh Adat atau Tokoh Masyarakat yang ada di sekitar kawasan ekowisata UPT. Kegiatan ekowisata di UPT Konservasi Penyu meskipun secara geografis berada di wilayah yang sangat dekat dengan kawasan konservasi, memiliki hubungan konvergensi yang sangat rendah. Keterbatasan komunikasi dan partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan menyebabkan relasi kolaboratif tidak terbangun secara maksimal. Selain adanya hubungan konvergensi, dalam pengelolaan kawasan ekowisata Unit Pelaksana Teknis (UPT) juga sering mengalami kendala akibat dari adanya kepentingan masing-masing aktor yang bertolak belakang seperti kebijakan pemerintah yang berubah-ubah atau tidak konsisten yang dapat menciptakan ketidakpastian bagi *stakeholder*, penggunaan sumberdaya dan akses terhadap sumberdaya yang menyebabkan perselisihan.

b. Divergensi

Divergensi yang sangat kuat terjadi diantara Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat terhadap Aperatur Desa Apar dan Tokoh Adat / Tokoh Masyarakat di sekitar kawasan Unit Pelaksana Teknis (UPT), karena tidak adanya dilibatkan Aperatur Desa maupun Tokoh Adat / Tokoh Masyarakat berbagai hal yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan konservasi penyu. Hal ini menimbulkan konflik antara kedua belah pihak, seharusnya pihak Unit Pelaksana Teknis (UPT) maupun Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat membangun musyawarah dengan mengundang aperatur desa dan tokoh adat / tokoh masyarakat untuk melakukan pengelolaan bersama, agar konflik yang ada dapat diselesaikan, dan menguntungkan kedua belah pihak dalam pengelolaan kawasan UPT Konservasi Penyu.

Berdasarkan penelitian Rinaldi & Syafrini, (2023) bisa menjalin kerjasama khususnya aperatur desa dan tokoh adat / tokoh masyarakat untuk lebih mensosialisaikan kepada masyarakat sekitar untuk pelarangan pengambilan telur penyu oleh masyarakat khususnya sekitar kawasan UPT serta dapat meningkatkan kelompok masyarakat yang masih bergantung hidupnya dengan mengambil telur penyu tersebut untuk diperjual belikan ke masyarakat luas, akan tetapi memberikan telur penyu tersebut ke UPT Konservasi Penyu dengan diberikan kompensasi serta menumbuhkan kesadaran dari masyarakat tersebut tentang penyu.

c. Ambivalen

Ambivalensi muncul ketika suatu aktor menunjukkan hubungan konvergensi dan divergensi secara bersamaan terhadap aktor lain. Dalam penelitian ini, Aparatur Desa dan Tokoh Masyarakat merupakan pihak dengan tingkat ambivalensi tertinggi. Meskipun mendukung konservasi secara prinsipil, mereka juga memperlihatkan ketegangan terhadap kebijakan pengelolaan kawasan, terutama karena tidak dilibatkan dalam forum-forum resmi dan pengambilan kebijakan.

Dari hasil wawancara, diketahui bahwa masyarakat telah beberapa kali mengundang pihak pengelola kawasan untuk berdiskusi di tingkat desa, namun tidak direspons. Ketidakhadiran pengelola dalam forum tersebut menciptakan persepsi negatif dan memperlemah potensi kolaborasi yang seharusnya bisa dibangun sejak awal, ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Harnino et al., (2021).

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN**

### **Kesimpulan**

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan kawasan konservasi berbasis ekowisata seperti UPT Konservasi Penyu Kota Pariaman memerlukan peran aktif dari berbagai pemangku kepentingan. Hasil analisis MACTOR mengidentifikasi bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, UPT Konservasi Penyu, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pariaman merupakan aktor dengan pengaruh dominan dan peran strategis dalam keberlangsungan kawasan. Sementara itu, aktor seperti Dinas Pariwisata Provinsi/Kota, aparat desa, dan tokoh adat/masyarakat memiliki peran yang masih terbatas, baik karena kurangnya pelibatan maupun karena ketergantungan yang tinggi.

Konflik peran dan ketimpangan informasi telah menciptakan ambivalensi dan divergensi dalam relasi antaraktor. Oleh karena itu, pembangunan sinergi yang lebih inklusif diperlukan agar setiap pihak memiliki peran yang proporsional dan konstruktif dalam mendukung keberlanjutan kawasan konservasi.

### **Rekomendasi Kebijakan**

Peneliti merekomendasikan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sumatera Barat agar meningkatkan komunikasi lintas sektor dan menyusun mekanisme koordinasi rutin dengan seluruh aktor terkait, peningkatan sumberdaya

dengan melakukan pelatihan dan merekrut tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan dan keterampilan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Penyu Kota Pariaman.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Penyu, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pariaman, Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat, Dinas Pariwisata Kota Pariaman, Aparatur Desa Apar, dosen pembimbing, orang tua, dan seluruh pihak yang membantu yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mengizinkan dan membantu selama proses penelitian.

### DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat. (2024). Selayang Pandang Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Penyu Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat.
- Edi Indrizal, (2019). Diskusi kelompok terarah focus group discussion (FGD) (Prinsip-Prinsip dan Langkah Pelaksanaan Lapangan). Universitas Andalas Padang. Hal 75-82
- Fauzi, T. (2018). Pengaruh Keberadaan Industri Tepung Tapioka terhadap Sosial dan Ekonomi Masyarakat.
- Godet, M. (1991). *Actors Moves and Strategies The Mactor Method : An Air Transport Case Study, Futures*. Butterworth-Heinemann Ltd.
- Ismane, M. A., Kusmana, C., Gunawan, A., Affandi, R., & Suwardi, S. (2018). Keberlanjutan Pengelolaan Kawasan Konservasi Penyu di Pantai Pangumbahan, Sukabumi, Jawa Barat. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan (Journal of Natural Resources and Environmental Management)*, 8(1), 36–43. <https://doi.org/10.29244/jpsl.8.1.36-43>
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2021). Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.106. Taman di Perairan dengan Target Konservasi Karang dan Penyu. (Jakarta : Kementerian Kelautan dan Perikanan RI)
- Komarudin, N., & Fahrurnisa. (2023). Implementation of Turtle Conservation Policy in the Nipah Essential Ecosystem Area for the Sustainability of Aquatic Resources and Environment. *Jurnal Biologi Tropis*, 23(1), 360–368. <https://doi.org/10.29303/jbt.v23i1.4624>
- Muliawan, I., & Firdaus, M. (2018). Nilai Ekonomi Ekosistem Terumbu Karang di Taman Wisata Perairan Kapoposang, Sulawesi Selatan Economic Value Of Coral Reef Ecosystem In The Kapoposang Marine Park Conservation , South Sulawesi. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, Vol 13(No 1), 133–142.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat. (2023). Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Tarif Wisata

- Rinaldi, R., & Syafrini, D. (2023). Perilaku Pengunjung pada Objek Wisata Konservasi Penyu Kota Pariaman. *Jurnal Perspektif*, 6(2), 207–217. <https://doi.org/10.24036/perspektif.v6i2.750>
- Suwanta, Efendi David, Suranto. (2016). Strategi Pengelolaan Batas Wilayah Negara Dalam Persepektif Stakeholde Collaborative Governance. Studi di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Makalah Seminar Nasional II Fisip Universitas Andalas. [Internet]; [di unduh 2024 Agust 24]; Terdapat di <https://www.academia.ed>
- Undang – Undang Republik Indonesia. (1990). Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya
- Undang – Undang Republik Indonesia. (2020). Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- Undang – Undang Republik Indonesia. (2014). Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Bab V tentang Kewenangan Daerah Provinsi di laut dan Daerah Provinsi yang berciri Kepulauan
- Usman, H. (2016). *Kebijakan ekonomi pengelolaan sumberdaya perikanan cakalang di kabupaten parigi moutong, sulawesi tengah.*
- Wilson, E. G., Allison, D., & And Magliocca, M. (n.d.). *Why healthy oceans need sea turtles: the importance of sea turtles to marine ecosystems.*
- Zeno Adi Eti Harnino, T., Nyoman Yoga Parawangsa, I., Aprilianita Sari, L., Sulastri Arsad, dan, Punggawa, T., Denpasar Selatan Kota Denpasar, K., Manajemen Kesehatan Ikan dan Budidaya Perairan, D., & Perikanan dan Kelautan, F. (2021). Efektifitas Pengelolaan Konservasi Penyu di Turtle Conservation and Education Center Serangan, Denpasar Bali Effectiveness of Sea Turtle Conservation Management at the Turtle Conservation and Education Center of Serangan, Denpasar Bali. In *Journal of Marine and Coastal Science* (Vol. 10, Issue 1). <https://e-journal.unair.ac.id/JMCS>